

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru terhadap Efektivitas Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal SMP di Kota Sukabumi

Ahmad Riyadi

IAI Nasional Laa Roiba Bogor

adom.rama@gmail.com

ABSTRACT

Minimum Service Standard (MSS) for the implementation of elementary and secondary education schools is a technical specification as a benchmark of minimum services that must be done by the district / city government in organizing schooling activities in the field of primary and secondary education. A measure of the success of the performance of the national education system is the guarantee of education accountability, one of the indicators is the enactment of an effective quality assurance management system in education to protect the community. The purpose of this study is to find out: 1) The influence of the leadership of the principal on the effectiveness of the implementation of Minimum Service Standards (SPM) of junior high schools in Sukabumi City. 2) Influence of teacher performance on the effectiveness of the implementation of Minimum Service Standards (MSS) of junior high schools in Sukabumi City. The method used in this study is quantitative, with the data analysis technique using inferential descriptive statistics. The results of the study showed that the principal's leadership variable (X1) directly affects the effectiveness of the implementation of junior high school SPM in Sukabumi City by 4.5%, and indirectly (through teacher performance) by 1.6%. While the influence of teacher performance (X2) on the effectiveness of junior high school implementation in Sukabumi City by 15.4%. Therefore, it can be concluded that 1) There is an influence between the leadership of the principal on the effectiveness of the implementation of junior high school in Sukabumi City. 2) There is an influence between the performance of teachers on the effectiveness of the implementation of junior high school in Sukabumi City. 3) There is the influence of the principal's leadership and teacher performance together on the effectiveness of the implementation of Minimum Service Standards (MSS) of junior high schools in Sukabumi City.

Keywords: *Principal Leadership, Teacher Performance, Effectiveness of Implementation of Minimal Service Standards.*

ABSTRAK

Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kegiatan persekolahan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Ukuran keberhasilan kinerja sistem pendidikan nasional adalah terjaminnya akuntabilitas pendidikan, yang salah satu indikatornya adalah berlakunya sistem manajemen jaminan mutu (*quality assurance*) yang efektif dalam pendidikan untuk melindungi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi. 2) Pengaruh kinerja guru terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik analisis datanya menggunakan statistik deskriptif inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepemimpinan kepala sekolah (X1) secara langsung berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi sebesar 4,5%, dan secara tidak langsung (melalui kinerja guru) sebesar 1,6%. Sedangkan pengaruh kinerja guru (X2) terhadap efektivitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi sebesar 15,4%. Oleh karena itu dapat disimpulkan

bahwa 1) Terdapat pengaruh antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi. 2) terdapat pengaruh antara kinerja guru terhadap efektivitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi. 3) Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kinerja Guru, Efektivitas Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.*

PENDAHULUAN

Reformasi pemerintah yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pengesaran penyelenggaraan pemerintah dari setralisasi ke desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah dalam waktu singkat. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas perkara sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemertaaan berkeadilan, dan memperhentikan potensi serta keanekaragaman daerah, dengan titik sentral otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Hal yang lebih esensial dari otonomi adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas segala permasalahan yang tercakup didalam pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk pembangunan bidang pendidikan.

Pendidikan adalah suatu hal yang esensial, bahkan merupakan salah satu elemen terpenting dari kehidupan seseorang. Pendidikan selain mempunyai peranan vital dalam seluruh upaya pembangunan, juga merupakan persyaratan suatu bangsa untuk membangun. Hasil studi sejumlah negara telah membuktikan bahwa peranan pendidikan dalam mencerdaskan masyarakat bagi keberhasilan pembangunan sangat besar. Anwar (2003 : 32) mengutip catatan *World Bank* (1990) yang mengemukakan bahwa di 13 negara-negara berkembang, pendidikan dasar 4 tahun yang diperoleh petani kecil mampu meningkatkan produktivitas mereka sebesar 7%. Selain itu, ditemukan bukti-bukti bahwa proses pendidikan mampu mengembangkan jenis-jenis perilaku yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Perlu disadari, bahwa pembangunan pendidikan sangatlah kompleks karena melibatkan berbagai pihak, aspek dan dimensi dengan sifatnya yang dinamis, mendalam dan luas. Pendidikan juga bukan sesuatu yang bersifat *instant* atau serba cepat, melainkan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan memerlukan ketekunan dan kesungguhan dalam penanganannya. Berkenaan dengan hal tersebut, desentralisasi di bidang pendidikan perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap, karena hal ini menyangkut upaya menjaga profesionalisme dan mutu pendidikan, menajmin tersedianya anggaran yang memadai untuk pendidikan, dan menumbuhkan keberpihakan pengambilan keputusan di daerah terhadap bidang pendidikan.

Sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu tujuan otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraa penidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun lembaga sepserti yayasan, organisasi masyarakat, atau pihak swasta. Peran serta semuanya dalam pendidikan akan lebih efektif, karena secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Otonomi pengambilan keputusan oleh daerah yang menyangkut pelaksanaan layanan pendidikan akan semakin mendekatkan pendidikan dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga akuntabilitas layanan tersebut bergeser dari orientasi kepada pemerintah pusat menuju akuntabilitas yang lebih orientasi kepada kepentingan masyarakat. hal ini sudah tentu akan menuntut lebih besarnya warga pendidikan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih berbasis masyarakat secara berkualitas.

Indikator keberhasilan kinerja sistem pendidikan nasional dapat dilihat dari pelaksanaan otonomi pengelolaan pendidikan secara efektif, bermutu tinggi, efisien dan akuntabel dalam kerangka satu sistem pendidikan nasional yang salah satunya ditandai dengan terbentuknya organisasi dan manajemen professional yang fungsional di tingkat sekolah, daerah, pusat sesuai dengan pengaturan kewenangan yang berlaku. Menurut Depdiknas (2003:3) Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kegiatan persekolahan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Ukuran keberhasilan kinerja sistem pendidikan nasional adalah terjaminnya akuntabilitas pendidikan, yang salah satu indikatornya adalah berlakunya sistem manajemen jaminan mutu (*quality assurance*) yang efektif dalam pendidikan untuk melindungi masyarakat.

Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh M. Thoha (1998:51) ia mengungkapkan bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan peningkatan profesionalisme pengelolaan pendidikan. Dengan perkataan lain bahwa pengelolaan pendidikan yang baik dan berkualitas dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, baik mutu masukan, proses dan keluaran pendidikan. Dalam konteks ini kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut untuk mampu mengelola sekolah secara professional. Keberhasilan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah sebagai pemimpin sekolah dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang bersangkutan dalam mempengaruhi perilaku.

Salah satu kendala yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia adalah masih belum efektifnya pengelolaan tingkat sekolah yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manajerial/kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu pencapaian wajib belajar pendidikan dasar. Sekolah sebagai salah satu bentuk organisasi pelayan public membutuhkan pemimpin yang dapat melaksanakan fungsi

dan mencapai tujuan sekolah. Kepala sekolah merupakan factor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Mulyasa (2003:126), mengungkapkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam sistem manajemen berbasis sekolah dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1) mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran; 2) dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; 3) mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan sekolah dan pendidikan; 4) berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah; 5) Bekerja dengan tim manajemen; serta 6) berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan manajemen pendidikan sebagian besar bertumpu pada kepemimpinan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Dalam peran dan fungsinya, kepala sekolah memiliki wewenang untuk menentukan perencanaan penyelenggaraan pendidikan serta menyusun standarisasi yang akan menjadi pedoman atau acuan bagi penyelenggara pendidikan di sekolahnya. Dalam penyusunannya disesuaikan dengan SK Mendiknas Nomor: 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan ti tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai tingkat sekolah. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip manajemen berbasis sekolah (*school Based Management*) dan partisipasi berbasis sekolah (*community based participation*).

Dalam perspektif manajemen berbasis sekolah, maka disamping memiliki kepemimpinan yang kuat, kepala sekolah juga diharapkan dapat mendorong para guru untuk bekerja secara optimal dalam suatu proses pendidikan di sekolah, sehingga memiliki akuntabilitas public yang tinggi dan pada gilirannya dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.

Guru harus mampu mengembangkan konsep, yang berorientasi pada pengguna (*client-oriented*), berbagai kewenangan (*power sharing*), pemberian dukungan (*advocacy support*) dan kemitraan (*partnership*) yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta didik. Dengan seperangkat peran yang dimilikinya itu, maka keberadaan guru dalam upaya pengendalian mutu pendidikan di sekolah menduduki peran yang sangat strategis, termasuk dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu (*quality assurance*) di bidang pendidikan di sekolah. Kedudukan guru dapat diposisikan sebagai pihak pengendali mutu terhadap segala kebijakan yang dilaksanakan oleh sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal sekolah kepada pelanggan (*customer*), yaitu siswa, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya. Notoatmojo (1997:23) menjelaskan apabila dilihat dari perspektif pendidikan dapat diartikan bahwa kinerja guru adalah status kemampuan seorang guru yang diukur berdasarkan pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugasnya.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan dapat disebut sebagai salah satu bentuk kebijakan public. Selain itu, aturan tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk ke dalam kebijakan public yang hanya dibuat oleh eksekutif dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen). Kebijakan public yang bersifat umum yang dibuat legislatif berkaitan dengan amanat UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Menurut Iskandar (2003:69) peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk konkrit dari kebijakan public. Kebijakan public seperti perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai barang public (*public good*). Sudarsono (1994:16) berpendapat bahwa ciri perundang-undangan sebagai *public good* adalah;

“peraturan perundang-undangan (*rule*) bertingkat-tingkat sesuai dengan hierarki proses kebijakan. Proses kebijakan akan menghasilkan *institutional arrangement* seperti undang-undang ini kemudian akan diterjemahkan oleh proses kebijakan pada level organisasi yang akan menghasilkan *institutional arrangement* yang tingkatannya lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres), atau Keputusan Menteri (Kepmen). Selanjutnya *institutional arrangement* ini akan diterjemahkan oleh kebijakan diterjemahkan di level operasional sehingga mempengaruhi pola hasil instruksi (*pattern of instruction outcome*) dari kebijakan tertentu.

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Sukabumi, masih terlihat belum adanya kesadaran public terhadap pentingnya pelaksanaan standar pelayanan tersebut. Padahal hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan akuntabilitas public sekolah.

Selain dari pada itu berdasarkan studi pendahuluan teridentifikasi beberapa permasalahan lain diantaranya; 1) Lemahnya kepemimpinan kepala sekolah dalam efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi. 2) Peran serta guru dalam menjalankan efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal masih dirasakan belum maksimal. 3) Tingkat profesionalitas tenaga kependidikan yang masih kurang dalam menunjang efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4) Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Sukabumi.

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal seharusnya menunjukkan sikap responsive terhadap berbagai tuntutan public dalam menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap peserta didik sebagaimana diamanatkan konstitusi. Oleh karena itu, peranan kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, guru-guru dan masyarakat di sekolah sangat menentukan arah kebijakan sekolah termasuk dalam hal sejauhmana mereka memiliki komitmen untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sekolah yang telah ditetapkan oleh pusat.

Berdasarkan paparan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan dimaksud yang diformulasikan dalam judul tesis sebagai berikut: "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal SMP di Kota Sukabumi".

Karena banyaknya factor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dalam Standar Pelayanan Minimal pada SMP di Kota Sukabumi, maka penulis hanya membatasi pada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi? 2) Apakah terdapat pengaruh kinerja guru terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi? Dan 3) Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi?

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi. 2) Pengaruh kinerja guru terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi. Dan 3) Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMP yang berada di Kota Sukabumi, adapun waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian, yang meliputi penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan survey, pengolahan data, dan penyusunan tesis adalah selama 5 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2009.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian didasarkan atas kebutuhan dalam penelitian. Ada dua jenis data yang dipergunakan yaitu: data primer dan data sekunder. 1) Data primer, yaitu data yang dikutif dan diolah langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden (guru SMP) untuk memperoleh data mengenai kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru dan efektivitas SPM SMP di Kota Sukabumi. Sedangkan data sekunder adalah data atau catatan/laporan yang telah dicetak/disediakan oleh kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sukabumi maupun instansi terkait lainnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah melalui studi pustaka yaitu; sebagai bahan perbandingan data-data praktis guna memperoleh suatu gambaran mengenai aspek-aspek yang diteliti, maka penulis menggunakan buku-buku, diktat, jurnal dan literature lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Selanjutnya metode survey yaitu; untuk memperoleh data primer yang didapatkan dari sumber asli

dilakukan dengan cara membagikan/menyebarkan kuesioner (Sugiyono, 2006:152). Kuesioner disebar kepada para guru sebagai respondennya yang jumlahnya adalah sebanyak 80 orang. Kuesioner dibuat dalam bentuk angket objektif, dengan lima alternative jawaban yang masing-masing diberikan skor tertinggi ke terendah. Jawaban dari setiap item instrument digunakan skala *Likert*. Sangat Setuju = 5, Setuju = 4, Kurang Setuju = 3, Tidak Setuju = 2, dan Sangat Kurang Setuju = 1.

Dalam penelitian, instrument harus memenuhi persyaratan sebagai instrument yang baik, dua dari persyaratan penting itu adalah *validitas* dan *reliabilitas* harus tinggi (Sugiyono, 2006:132). Menurut Sugiyono (2006:272), butir instrument yang valid adalah jika koefisiennya sama dengan atau lebih dari 0,27. Adapun metode yang dipakai adalah dengan menggunakan korelasi *product moment*. Sedangkan reliabilitas adalah sebagai ukuran yang menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Fred N Kerlinger dalam S. Margono, 2004:181).

Definisi konseptual variable kepemimpinan kepala sekolah adalah suatu cara yang digunakan seorang kepala sekolah sehingga dapat mempengaruhi kinerja guru mengajar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Definisi operasional kepala sekolah adalah skor yang diperoleh guru SMP di Kota Sukabumi setelah melakukan penilaian terhadap kepemimpinan kepala sekolah yang dilakukan dengan cara menjawab instrument berupa kuesioner kepemimpinan kepala sekolah yang berbentuk skala *Likert*.

Dari definisi konseptual diatas, maka dimensi dari kepemimpinan kepala sekolah adalah : (1) gaya kepemimpinan yang meliputi indikator : direktif, konsultatif, partisipatif dan delegatif. (2) Sifat kepemimpinan, yang meliputi indikator : komunikatif, fleksibilitas, kebersamaan, tanggungjawab dan model peranan positif, dan (3) keterampilan kepemimpinan, yang meliputi indikator: *technical skills*, *human skills* dan *conceptual skills*. Dari indikator-indikator tersebut dikembangkan menjadi butir instrument sebanyak 17 butir.

Definisi konseptual kinerja guru adalah gambaran hasil kerja yang dilakukan guru di sekolahnya terkait dengan tugas dan wewenang yang diembannya dan merupakan tanggung jawabnya. Skala pengukurannya adalah ordinal. Sedangkan definisi operasional kinerja guru adalah skor yang diperoleh oleh guru SMP di Kota Sukabumi setelah melakukan penilaian terhadap kinerja guru yang dilakukan dengan cara menjawab instrument berupa kuesioner kinerja guru yg berbentuk skala *Likert*. Skala pengukurannya adalah ordinal.

Dari definisi konseptual dan operasional diatas maka dimensi variable kinerja guru adalah (1) Kualitas kerja, yang meliputi indikator: pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, kesesuaian kuantitas pegawai, dan ketersediaan sumber dana; (2) Ketepatan pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat kesalahan pekerjaan, dan dukungan sarana kerja; (3) Inisiatif, yang meliputi indikator: motivasi kerja, peningkatan kualitas SDM dan penanganan masalah; (4) Kemampuan dalam bekerja, yang meliputi indikator: pemahaman tentang penjabaran fungsi-fungsi pekerjaan, kesadaran terhadap tanggungjawab dan pencapaian tujuan yang optimal;

da (5) Komunikasi, yang meliputi indikator: penyampaian kebijakan dan rumusan tugas yang jelas. Dari indikator-indikator tersebut dikembangkan menjadi butir instrument sebanyak 16 butir.

Definisi Konseptual Efektivitas SPM adalah kemampuan setiap sekolah untuk merealisasikan dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan SPM. SPM merupakan spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, dan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya guna menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu dan akuntabel. Definisi Operasional Efektivitas SPM adalah skor yang diperoleh guru SMP di Kota Sukabumi setelah melakukan penilaian terhadap efektivitas SPM di Kota Sukabumi yang dilakukan dengan cara menjawab instrument berupa kuesioner Efektifitas SPM yang berbentuk skala *Likert*. Skala pengukurannya adalah ordinal.

Dari definisi konseptual dan definisi operasional diatas maka dimensi dari variable efektivitas SPM adalah (1) Kurikulum, yang meliputi indikator: isi kurikulum dan penerapan kurikulum; (2) Kepesertadidikan (siswa), yang meliputi indikator: pembinaan siswa dan tindak lanjut pendidikan; (3) Pembelajaran, yang meliputi indikator: pelaksanaan, kondisi sumberdaya, dan metode serta teknik pembelajaran; (4) Ketenagaan pendidikan yang meliputi indikator: hadiah dan sanksi, hubungan kerja, pengetahuan dan kemampuan, gaji dan honor, dan rekrutmen; (5) Sarana dan prasarana, yang meliputi indikator: keadministrasian, suasana kerja, dan penataan lingkungan belajar; (7) Pembiayaan yang meliputi indikator: pengelolaan; dan (8) Manajemen sekolah yang meliputi indikator: transparansi, pertanggungjawaban dan penerapan aspek-aspek manajerial. Dari indikator-indikator tersebut dikembangkan menjadi instrument sebanyak 16 butir instrument.

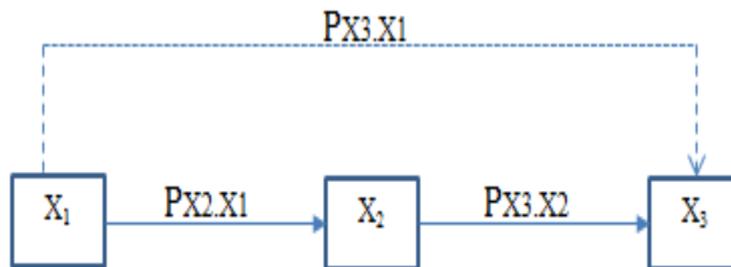
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMP yang berada di Kota Sukabumi sebanyak 738 orang yang tersebar di 31 SMP. Sedangkan sampel yang diambil sebanyak 80 orang guru. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample ini adalah *simple random sampling*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan statistika deskriptif-inferensial. Menurut Nazir (1999:33) mengatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Selanjutnya Arikunto(1998:89) mengatakan bahwa studi deskriptif, yaitu pengumpulan data sebanyak-banyaknya mengenai factor-faktor yang merupakan pendukung dalam memahami dan memberikan gambaran yang lebih jelas dari variable-variabel yang berhubungan.

Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Lothar dan Mctavish (1993:358) menyatakan bahwa "*Inferential statistic is a set of tools used to help an investigator make inferences about a population from description of data a sample*". Analisis dengan menggunakan statistic inferensial adalah dalam upaya untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variable yang diamati. Dalam

pennelitian ini, statistika inferensial yang digunakan adalah teknik *Path Analysis*. Analisis jalur merupakan metode yang tepat untuk mengetahui pengaruh, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung dari satu variable terhadap variable lainnya.

Gambar 1. Diagram Hubungan antar Variabel



Keterangan:

X1 : Kepemimpinan Kepala Sekolah (variable eksogen/penyebab)

X2 : Kinerja Guru (variable eksogen sekaligus endogen/akibat)

X3 : Efektivitas SPM (variable endogen)

PX2.X1 : Parameter jalur yang menunjukkan besarnya pengaruh X1 terhadap X2

PX3.X2 : Parameter jalur yang menunjukkan besarnya pengaruh X2 terhadap X3

PX3.X1 : Parameter jalur yang menunjukkan besarnya pengaruh X1 terhadap X3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini, maka pengetahuan terhadap deskripsi data adalah sangat penting. Deskripsi data yang perlu diketahui adalah menyangkut ukuran gejala sentral dan ukuran penyebaran. Dengan menggunakan statistika, maka dari pengolahan data mentah akan diperoleh harga-harga sebagai berikut: harga rata-rata, median, modus, simpangan baku, distribusi frekuensi dan grafik histogram.

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini dan banyaknya variable yang diteliti, maka deskripsi data di kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu (1) kepemimpinan kepala sekolah; (2) kinerja guru; dan (3) efektivitas pelaksanaan SPM.

(1) Kepemimpinan kepala sekolah (X1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentangan skor variable kepemimpinan kepala sekolah berada antara 53 sampai dengan 74 dari skor teoritik 17 hingga 85, skor rata-rata sebesar 63,51, simpangan baku (standar deviasi) sebesar 5,6 median sebesar 65, modul sebesar 57,00. Sedangkan distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah

| NO | Kelas Interval | Frekuensi Absolut | Frekuensi Relatif |
|----|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 52,0 – 54,0 | 4 | 5,00 |
| 2 | 54,5 – 57,5 | 14 | 17,50 |

| | | | |
|--------|-------------|----|--------|
| 3 | 58,0 - 61,0 | 13 | 16,25 |
| 4 | 61,5 - 64,5 | 8 | 10,00 |
| 5 | 65,0 - 68,0 | 23 | 28,75 |
| 6 | 68,5 - 71,5 | 8 | 11,25 |
| 7 | 72,0 - 75,0 | 8 | 11,25 |
| Jumlah | | 80 | 100,00 |

(2) Kinerja Guru (X2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentangan skor variable kinerja guru berada antara 57 sampai dengan 92 dari skor teoritik 16 hingga 80, skor rata-rata sebesar 77,06, simpangan baku (standar deviasi) sebesar 6,27, median sebesar 79,00, modus sebesar 81. Sedangkan distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Guru

| NO | Kelas Interval | Frekuensi Absolut | Frekuensi Relatif |
|--------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 58,0 - 63,5 | 2 | 2,50 |
| 2 | 64,5 - 69,0 | 8 | 10,00 |
| 3 | 69,5 - 74,5 | 9 | 11,25 |
| 4 | 75,0 - 80,0 | 25 | 31,25 |
| 5 | 81,5 - 86,5 | 34 | 42,50 |
| 6 | 87,0 - 92,0 | 1 | 1,25 |
| 7 | 92,5 - 98,0 | 1 | 1,25 |
| Jumlah | | 80 | 100,00 |

(3) Efektivitas Pelaksanaan SPM (X3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentangan skor variable pelaksanaan SPM berada antara 74 sampai dengan 94 dari skor teoritik 21 hingga 105. Skor rata-rata 84,00, simpangan baku (standar deviasi) sebesar 4,05, median 84, modus 83. Sedangkan distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Guru

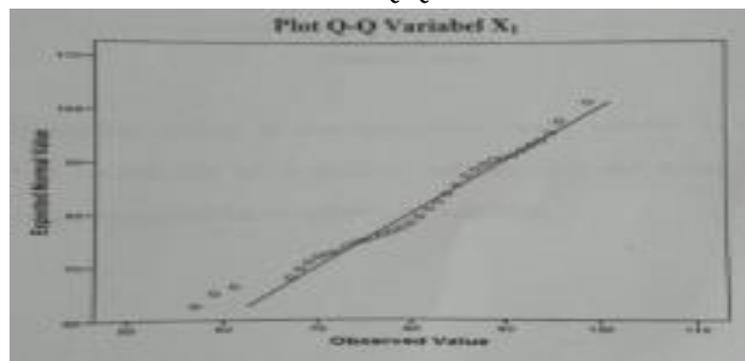
| NO | Kelas Interval | Frekuensi Absolut | Frekuensi Relatif |
|--------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 74 - 76 | 9 | 11,25 |
| 2 | 77 - 79 | 0 | 0,00 |
| 3 | 80 - 82 | 5 | 6,25 |
| 4 | 83 - 85 | 39 | 48,75 |
| 5 | 86 - 88 | 19 | 23,75 |
| 6 | 89 - 91 | 6 | 7,50 |
| 7 | 92 - 94 | 2 | 2,50 |
| Jumlah | | 80 | 100,00 |

Data variabel yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis inferensial melalui teknik analisis jalur (*path analysis*) harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya: (1) sample pasangan data variabel harus diambil secara acak; (2) Data pada kelompok variabel, baik variabel endogen maupun exogen harus independen dan berdistribusi normal dan homogen; dan (3) Hubungan antar variabel endogen dan exogen adalah bersifat kausalitas.

Untuk mengetahui normalitas data dari ketiga variabel dalam penelitian ini, diuji menggunakan plt Q-Q.

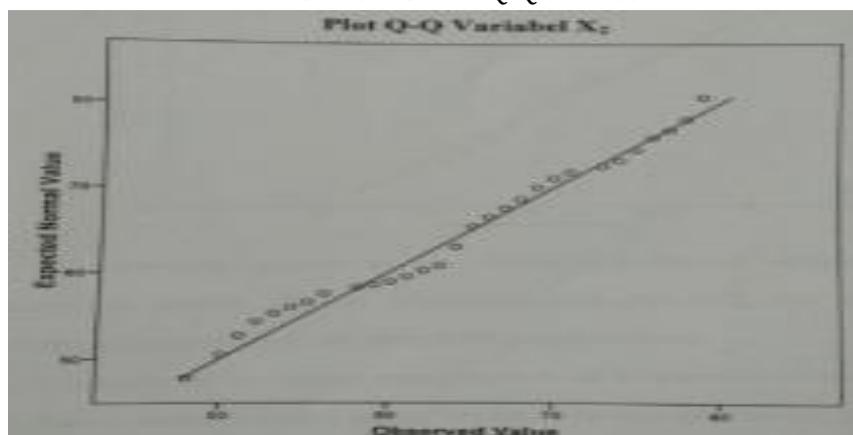
Hasil uji normalitas pada variabel X1 (Kepemimpinan Kepala Sekolah) terlihat plot Q-Q mengikuti pola garis lurus. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini:

Gambar 2. Plot Q-Q Variabel X1



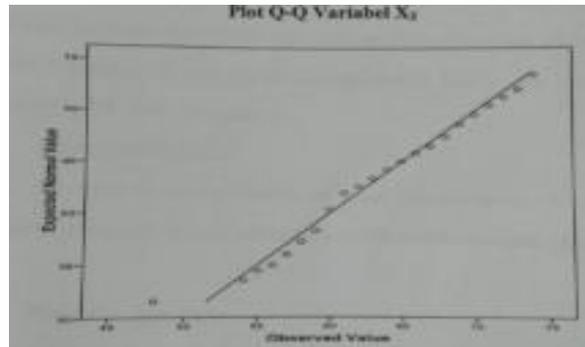
Hasil uji normalitas pada variabel X2 (Kinerja Guru) terlihat plot Q-Q membentuk dan mengikuti pola garis lurus. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini:

Gambar 3. Plot Q-Q Variabel X2



Hasil uji normalitas pada variabel X3 (Efektivitas Pelaksanaan SPM) terlihat plot Q-Q membentuk dan mengikuti pola garis lurus. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini:

Gambar 4. Plot Q-Q Variabel X3



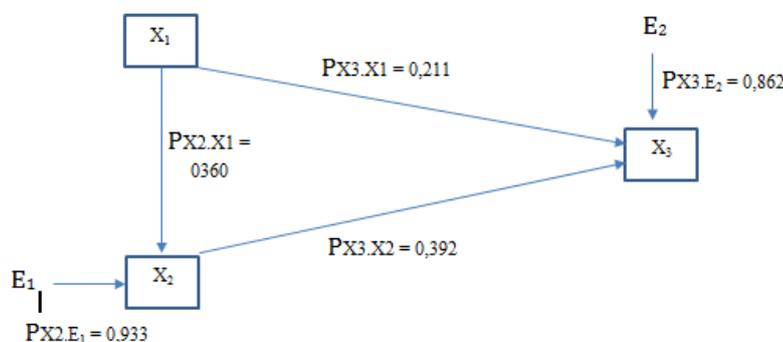
Pengujian homogenitas dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah sebaran data dari suatu variabel tidak menyimpang dari ciri-ciri data yang homogen. Uji dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Lavene. Diperoleh hasil bahwa varians X2 atas X1, X3 atas X2 dan X3 atas X1 adalah homogen.

Dari hasil uji autokorelasi, diperoleh hasil bahwa semua model dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai kriteria uji Durbin-Watson (DW) yang berada diantara interval 1,08 - 2,92, artinya model bebas dari autokorelasi.

Dari hasil uji multikoleniaritas diperoleh nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoleniaritas.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengaruh dari variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1) terhadap kinerja guru (X2) dan kepemimpinan kepala sekolah (X1) terhadap pelaksanaan SPM (X3) diperlihatkan oleh besarnya parameter struktural, yaitu $P_{X2.X1}$, $P_{X3.X2}$, dan $P_{X3.X1}$. lebih jelasnya dapat digambarkan dengan diagram jalur dengan koefisien jalur hasil perhitungan, dalam struktur sebagai berikut:

Gambar 5. Diagram Jalur dan Koefisien Jalur



Sub struktur 1 diatas menggambarkan hubungan antara variable penyebab dan variable akibat yang secara matematis dapat dinyatakan dalam persamaan structural

$$P_{X3.X1} = P_{X2.X1}.X1 + P_{X3.X2}.X2 + (E1+E2)$$

Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien jalur X1 terhadap X2 adalah 0,360 dan koefisien jalur X2 adalah 0,392, sehingga persamaan structural di atas dapat dituliskan menjadi:

$$P_{X3.X1} = 0,360X1 + 0,392X2 + E$$

Koefisien jalur tersebut juga menunjukkan pengaruh langsung dari X1 terhadap X3 dan X2 terhadap X3 dan secara bersama X1 dan X2 terhadap X3. Pengaruh langsung X1 terhadap X3 sebesar 0,045, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui hubungan korelatif dengan X2 adalah sebesar 0,016 dan pengaruh total (langsung dan tidak langsung) X1 dan X2 terhadap X3 adalah sebesar 0,061. Pengaruh langsung X2 terhadap X3 adalah sebesar 0,154.

Berdasarkan nilai-nilai dari koefisien jalur di atas, maka X1 secara langsung menentukan perubahan-perubahan X3 adalah sebesar 4,5% dan melalui hubungannya dengan X2 adalah sebesar 1,6%. Dengan demikian secara total X1 menentukan perubahan-perubahan pada X3 adalah sebesar 6,1%. Adapun secara total X2 mempengaruhi perubahan-perubahan pada X3 sebesar 15,4%. Pada bagian lain, X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi X3 sebesar 25,7%. Besarnya pengaruh secara proporsional yang disebabkan oleh variable lain di luar variable X1 dan X2 dinyatakan dengan $P_{X3.E2}$ sebesar 74,3%.

Untuk pengujian hipotesis dengan strukturnya, baik pengujian secara parsial maupun secara bersama-sama diuraikan sebagai berikut:

Hipotesis pertama yang diajukan adalah "Terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pelaksanaan SPM di Kota Sukabumi". Dengan kata lain, semakin baik kepemimpinan kepala sekolah, maka pelaksanaan SPM akan semakin efektif. Sebaliknya, jika kepemimpinan kepala sekolah kurang baik, maka pelaksanaan SPM akan semakin tidak efektif.

Hipotesis yang diajukan adalah:

$$H_0 : P_{X3.X1} = 0 \quad i = 1 \text{ dan } 2$$

$$H_1 : P_{X3.X1} \neq 0$$

Hubungan kedua variable tersebut diuji dengan menggunakan statistic uji t. hasil uji-t diperoleh bahwa $t_{hitung} = 2,000$. Dengan membandingkannya terhadap $t_{tabel} = 1,98$ diperoleh hasil bahwa koefisien jalur adalah sangat signifikan, artinya kepemimpinan kepala sekolah (X1) berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan SPM (X3)

Hasil analisis jalur dalam penelitian ini sekaligus menolak H_0 yang menyatakan "tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah

terhadap efektifitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi". Dan sebaliknya menerima H_1 yang menyatakan "Terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektifitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi".

Pengaruh langsung X_1 terhadap X_3 adalah sebesar 4,5%. Artinya apabila guru SMP di Kota Sukabumi diminta untuk melakukan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaan SPM, maka variasi jawaban yang diberikan adalah sebesar 4,5% mengatakan bahwa efektifitas pelaksanaan SPM dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Sebesar 95,5% merupakan factor-faktor lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan SPM.

Selain dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, efektifitas pelaksanaan SPM juga dipengaruhi oleh kinerja guru sebesar 1,6%. Artinya pengaruh tidak langsung dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektifitas pelaksanaan SPM melalui kinerja guru adalah 1,6%.

Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektifitas pelaksanaan SPM, baik langsung maupun tidak langsung (melalui kinerja guru) secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 6,1%. Artinya, apabila para guru melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan SPM, variasi jawaban para guru mengatakan bahwa efektifitas pelaksanaan SPM, dipengaruhi secara langsung oleh kepemimpinan kepala sekolah dan secara tidak langsung melalui kinerja guru. Sisanya adalah dipengaruhi oleh diluar kedua factor tersebut, yaitu sebesar 93,9%.

Hipotesis kedua yang diajukan adalah "Terdapat pengaruh yang signifikan kinerja guru terhadap efektifitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi. Dengan kata lain, diduga semakin baik kinerja guru, maka efektifitas pelaksanaan SPM semakin efektif, dan sebaliknya semakin rendah kinerja guru, maka pelaksanaan SPM semakin tidak efektif.

Hipotesis yang diajukan adalah:

H_0 : $P_{X_3 \times X_2} = 0$ $i = 1$ dan 2

H_1 : $P_{X_3 \times X_2} \neq 0$

Hubungan kedua variable tersebut diuji dengan menggunakan statistic uji t. hasil uji-t diperoleh bahwa $t_{hitung} = 3,718$. Dengan membandingkannya terhadap $t_{tabel} = 1,98$ diperoleh hasil bahwa koefisien jalur adalah sangat signifikan, artinya kinerja guru (X_2) berpengaruh langsung terhadap efektifitas pelaksanaan SPM (X_3).

Hasil analisis jalur dalam penelitian ini sekaligus menolak H_0 yang menyatakan "Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektifitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi". Dan sebaliknya menerima H_1 yang menyatakan "Terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektifitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi".

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ternyata kedua hipotesis yang diajukan secara signifikan dapat diterima. Uraian masing-masing penerimaan kedua hipotesis yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pengujian hipotesis pertama yang menyimpulkan bahwa terdapat kontribusi yang sangat signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektifitas

pelaksanaan SPM. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterkaitan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan efektivitas pelaksanaan SPM adalah sangat signifikan, artinya kepemimpinan kepala sekolah menunjukkan pengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan SPM. Apabila kepemimpinan kepala sekolah baik, maka efektivitas pelaksanaan SPM akan semakin efektif. Sebaliknya, jika kepemimpinan kepala sekolah kurang baik, maka efektivitas pelaksanaan SPM tidak efektif.

(2) Pengujian hipotesis kedua menyimpulkan bahwa kinerja guru memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi. Tingginya kinerja guru dapat membuat pelaksanaan SPM akan semakin efektif. Sebaliknya apabila kinerja guru tidak baik, maka pelaksanaan SPM akan tidak efektif.

Penelitian ini disadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Salah satunya adalah dalam pemilihan variable-variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan SPM. Dalam kenyataannya, banyak factor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SPM, misalnya tingkat profesionalitas tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang cukup memadai, dukungan pemerintah dan masyarakat, anggaran pendidikan yang cukup dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun dalam penelitian ini dibatasi pada dua variable saja, yaitu: variable kepemimpinan kepala sekolah dan variable kinerja guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat factor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan SPM, yaitu 74,3% namun tidak terungkap dalam penelitian ini.

Keterbatasan lainnya adalah masih belum menyeluruhnya penelitian yang dilaksanakan, dimana secara konseptual dan metodologi, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengedepankan aspek pengujian terhadap data-data yang berupa angka-angka dalam menarik suatu kesimpulan dan tidak dilengkapi oleh pendekatan kualitatif untuk mempertajam kajian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

Dari segi instrumentasi, penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama, didukung oleh wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi kekurangannya. Sedangkan masih banyak instrument lain dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian yang penulis sampaikan di atas, diharapkan akan menjadi dasar bagi peneliti-peneliti lainnya untuk mengkaji hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini. Sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu manajemen pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SMP di Kota Sukabumi. Kepala sekolah merupakan salah satu factor yang sangat berpengaruh terhadap

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kepemimpinan yang baik ditunjukkan oleh kepala sekolah secara langsung telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi. Selain itu, secara tidak langsung, kepemimpinan kepala sekolah melalui kinerja guru mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan SPM SMP di Kota Sukabumi sangat dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kepemimpinan kepala sekolah. 2) Terdapat pengaruh kinerja guru terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SMP di Kota Sukabumi. Oleh karena itu Guru sebagai sosok yang langsung berhubungan dengan siswa, perlu meningkatkan kinerjanya, kegiatan pembelajaran, bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh para guru akan dapat dirasakan langsung oleh para siswa. Apabila guru tidak mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik, maka pelayanan yang telah ditetapkan dalam SPM di suatu sekolah akan menjadi tidak efektif. 3) Terdapat Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP di Kota Sukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. M.I. (2003). *Administrasi Pendidikan dan Manejemen Biaya Pendidikan : Teori, Konsep dan Isu*. Alfabeta: Bandung
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta : Jakarta
- Iskandar, J. (2003). *Teori Administrasi*. Pustaka Program Pascasarjana Universitas Garut.
- Mulyasa, E. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi*. P.T. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Nazir. (1999). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Notoatmojo, A. (1997). *Manajemen Organisasi*. Bumi Aksara : Jakarta
- Sugiyono. (1997). *Metode Penelitian Administratif*. Alfabeta : Bandung
- Sugiyono. (2006). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta : Bandung
- Thoha, M. (1998). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Rajawali: Jakarta